

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

2020



INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT

2020



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PARIAMAN 2020

ISBN : 978-623-5699-02-8
No. Publikasi : 13770.2113
Katalog : 4102004.1377

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi+65 halaman

Penyusun Naskah :
Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Desain Kover :
Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dicetak Oleh :
CV. Graphic Dwipa

Sumber Ilustrasi :
Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan /atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PARIAMAN 2020

TIM PENYUSUN

Pengarah : Yuliandri, SE, MM

Penanggung Jawab : Deva Sabrina, SST

Editor : 1. Deva Sabrina, S.ST
2. Tri Hayuni Syardi, SST

Penulis : Ade Sandria, S.Si

Pengolah Data : Ade Sandria, S.Si

Desain Cover dan Infografis : Yulanda Widya, S.Tr.Stat

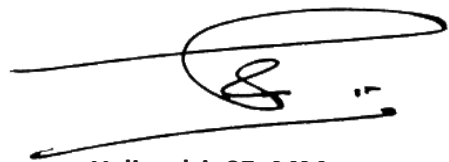
KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman 2020 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Pariaman yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Pariaman antar waktu dan perbandingannya antar jenis kelamin. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dari Dinas Instansi di Kota Pariaman. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Diharapkan publikasi ini bermanfaat, kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Pariaman, November 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pariaman



Yuliandri, SE, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xii
Singkatan dan Akronim	xv
Bab I Kependudukan	3
Bab II Kesehatan dan Gizi	13
Bab III Pendidikan	21
Bab IV Ketenagakerjaan	31
Bab V Taraf dan Pola Konsumsi	39
Bab VI Perumahan dan Lingkungan	47
Bab VII Kemiskinan	55
Bab VIII Sosial Lainnya	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pariaman, 2018-2020	3
Tabel 1.2	Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Pariaman Menurut Kecamatan, 2020	4
Tabel 1.3	Kepadatan Penduduk Kota Pariaman, 2016-2020	5
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan (persen) Kota Pariaman, 2016-2020	6
Tabel 1.5	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB, 2018-2020	10
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman, 2020	14
Tabel 2.2	Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kota Pariaman, 2019-2020	16
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat (Persen) Kota Pariaman, 2019-2020	17
Tabel 2.4	Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan (Persen), 2020	18

Tabel 3.1	Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni di Kota Pariaman, 2018-2020	25
Tabel 3.2	Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas di Kota Pariaman, 2020	26
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pariaman (Persen), 2018-2020	32
Tabel 4.2	Penduduk 15 tahun ke Atas yang Termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2020	33
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2020	35
Tabel 5.1	Perkembangan Pengeluaran Rata-rata Perkapita/Bulan di Kota Pariaman, 2019-2020	40
Tabel 5.2	Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kapita di Kota Pariaman (Persen), 2018-2020	41
Tabel 5.3	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Pariaman, 2020	44
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Perumahan di Kota Pariaman, 2019-2020	48
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kota Pariaman, 2019-2020	50

Tabel 7.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Pariaman, 2016-2020	56
Tabel 7.2	Beberapa Indikator Penduduk miskin di Kota Pariaman, 2018-2020	56
Tabel 8.1	Persentase Indikator Sosial lainnya di Kota Pariaman Tahun 2018-2020	61
Tabel 8.2	Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas yang Memiliki/Menguasai Teknologi Informasi di Kota Pariaman, 2020	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Rasio ketergantungan Penduduk Kota Pariaman, 2016-2020	7
Gambar 1.2	Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama (persen), 2019-2020	9
Gambar 2.1	Angka Kesakitan di Kota Pariaman, 2018-2020	14
Gambar 2.2	Umur Harapan Hidup di Kota Pariaman, 2016-2020	15
Gambar 3.1	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin (persen) di Kota Pariaman, 2019-2020	23
Gambar 3.2	Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman, 2016-2020	24
Gambar 4.1	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2020	34
Gambar 5.1	Indeks Gini Ratio Kota Pariaman, 2016-2020	43
Gambar 6.1	Status Kepemilikan Rumah (Persen) di Kota Pariaman, 2020	51
Gambar 8.1	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas yang Memakai dan Akses Teknologi Informasi Menurut Jenis Kelamin, 2020	64
Gambar 8.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Barang dan Jenis Barang yang dimiliki, 2020	65

SINGKATAN DAN AKRONIM

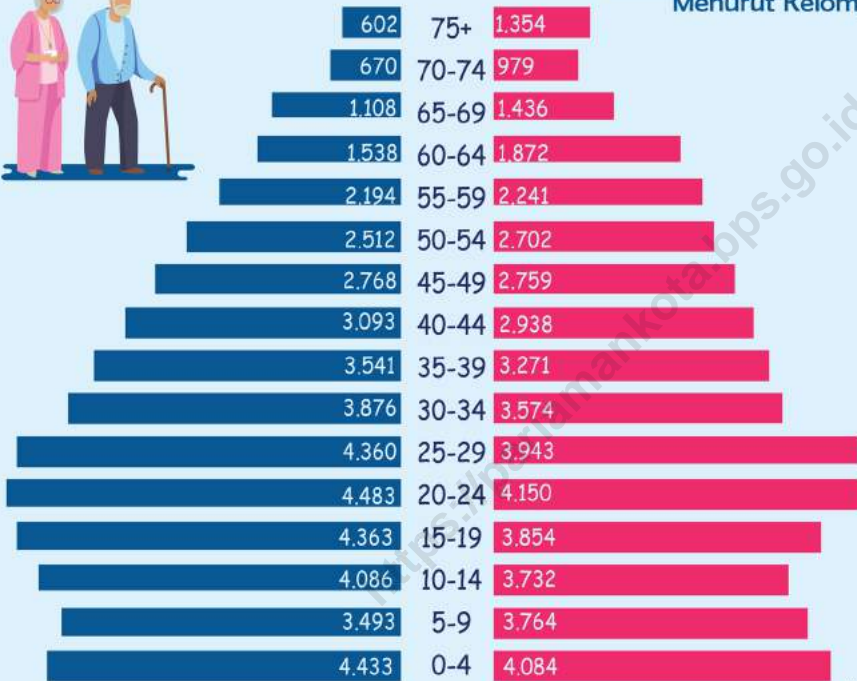
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
ASFR	Age specifik Fertility Rate
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
SDGs	Sustainable Development Goals
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UKBM	Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
AMH	Angka Melek Huruf
APK	Angka Partisipasi Kasar
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
TSP	Tingkat Setengah Pengangguran
GK	Garis Kemiskinan
ART	Anggota Rumah Tangga
KRT	Kepala Rumah Tangga

1

Kependudukan

Jumlah Penduduk

Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Pariaman, 2020



Rasio jenis kelamin di Kota Pariaman Tahun 2020 ialah sebesar

Sex ratio **101,97**

Artinya, setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 102 penduduk laki-laki di Kota Pariaman Tahun 2020



47.571
Orang 



46.653
Orang

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan jumlah penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.



Tahukah anda? Bahwa pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Kota Pariaman mencapai **1.286** orang per km²

KEPENDUDUKAN

1

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2020 adalah 94.224 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2019 (88.501 jiwa) dengan laju pertumbuhan 6,47 persen per tahun. Laju pertumbuhan menunjukkan angka positif serta menunjukkan kecenderungan yang meningkat yaitu dari 1,16 persen di tahun 2018 menjadi 1,00 persen di tahun 2019 dan 6,47 persen di tahun 2020.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pariaman, 2018-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)
2018	87,626	1.16
2019	88,501	1.00
2020	94,224	6.47

Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010 dan Hasil SP2020

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

Penduduk Kota Pariaman lebih didominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin penduduk di tahun 2020 adalah sebesar 101,22 artinya secara rata-rata dalam setiap seratus orang penduduk wanita akan terdapat 102 penduduk laki-laki. Semua kecamatan yang rasio jenis kelamin penduduknya diatas 100 persen.

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2020 adalah 94.224 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2019 (88.501 jiwa) dengan laju pertumbuhan 6,47 persen per tahun. Laju pertumbuhan menunjukkan angka positif serta menunjukkan kecenderungan yang meningkat yaitu dari 1,16 persen di tahun 2018 menjadi 1,00 persen di tahun 2019 dan 6,47 persen di tahun 2020.

Tabel 1.2 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Pariaman Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki- laki	Wanita	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pariaman Selatan	10,100	9,906	20,006	101.96
Pariaman Timur	16,171	15,759	31,930	102.61
Pariaman Tengah	9,946	9,751	19,697	102.00
Pariaman Selatan	11,354	11,237	22,591	101.04
Kota Pariaman	47,571	46,653	94,224	101.97

Sumber: Hasil SP2020

Kepadatan Penduduk

Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah penduduk yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata sehingga berdampak pada kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Konsentrasi penduduk yang tinggi pada suatu wilayah di satu sisi dapat memudahkan dalam pelayanan sosial, namun jika telah melebihi kapasitas lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial jika tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi pula. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kota Pariaman pada tahun 2020 relatif cukup padat dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah Kota Pariaman sebesar 73,36 kilo meter persegi

dan jumlah penduduk di tahun 2020 sebesar 94.224 jiwa, berarti secara rata-rata kepadatan penduduk di Kota Pariaman sebesar 1.1284 jiwa perkilo meter persegi, yang berarti dalam setiap 1 km luas kota Pariaman di tempati oleh sebanyak 1.1284 jiwa per kilo meter persegi. Dari Tabel 1.1 tingkat kepadatan meningkat dari tahun 2016-2020 yaitu sebesar 1.284 jiwa per kilo meter.

Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Kota Pariaman, 2020

Tahun	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)
2016	1168
2017	1181
2018	1195
2019	1206
2020	1284

Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan banyak hal diantaranya tingkat produktivitas penduduk serta tingkat konsumsi penduduk. Dilihat dari sisi konsumsi, penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun membutuhkan pelayanan sosial dan fasilitas umum yang lebih besar seperti pelayanan kesehatan serta pendidikan. Dari sisi produktivitas, penduduk pada kelompok umur tersebut masih rendah, sehingga secara umum tingkat konsumsi akan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang mampu dihasilkan. Begitu pula dengan penduduk yang ada pada kelompok umur diatas 65 tahun, dengan produktivitas yang secara umum mulai menurun, mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Sebaliknya untuk penduduk pada kelompok usia 15-64 tahun yang produktivitasnya secara rata-rata akan lebih tinggi dibandingkan konsumsinya, sehingga semakin besar jumlah penduduk pada kelompok umur ini relatif terhadap kelompok umur lainnya, berpeluang untuk meningkatkan produktivitas di suatu wilayah.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan (persen) Kota Pariaman, Tahun 2016-2020

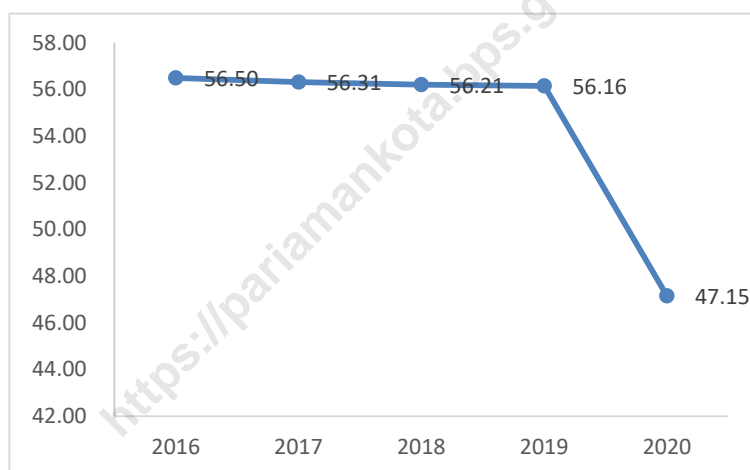
Tahun	Kelompok Umur (Tahun)			Rasio Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	29.75	63.90	6.35	56.50
2017	29.54	63.98	6.48	56.31
2018	29.34	64.02	6.64	56.21
2019	29.12	64.04	6.84	56.16
2020	25.52	67.96	6.53	47.15

Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010 dan Hasil SP2020

Proporsi penduduk umur produktif di Kota Pariaman pada tahun 2020 adalah yang terbesar dari lima tahun sebelumnya dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 komposisi penduduk usia produktif sebesar 63,90 persen menjadi 67,96 persen di tahun 2020. Sementara komposisi usia 0-14 tahun menu run dari 29,75 persen di tahun 2016 menjadi 25,52 persen di tahun 2020. Sedangkan pada komposisi penduduk usia 65 tahun keatas mengalami kenaikan dari 6,35 persen menjadi 6,53 persen. Hal tersebut menyebabkan angka beban ketergantungan penduduk Kota Pariaman usia tersebut terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara umum, angka beban ketergantungan tahun 2016-2019 dikisaran 56 persen, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 47, 15 persen

Angka beban ketergantungan pada tahun 2020 sebesar 47,15 berarti setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 47 orang penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Menurunnya angka beban ketergantungan juga dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif yang semakin meningkat relatif terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif. Jika kecenderungan penurunan angka beban ketergantungan terus berlangsung, maka diharapkan Indonesia akan segera mencapai fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah (windows of opportunity).

Gambar 1.1 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pariaman, 2016-2020



Sumber: Hasil SP2020

Angka beban ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi yaitu angka ketergantungan di bawah 50 yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk produktif. Seperti diketahui bahwa bonus demografi terjadi apa bila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja 15-64 tahun, dimana penduduk pada kelompok ini menjadi potensial bagi Indonesia untuk menjadi negara maju apabila sumber daya manusianya berkualitas. Sebaliknya, akan menjadi bumerang jika kualitas sumber daya manusia penduduk produktif itu rendah (Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035).

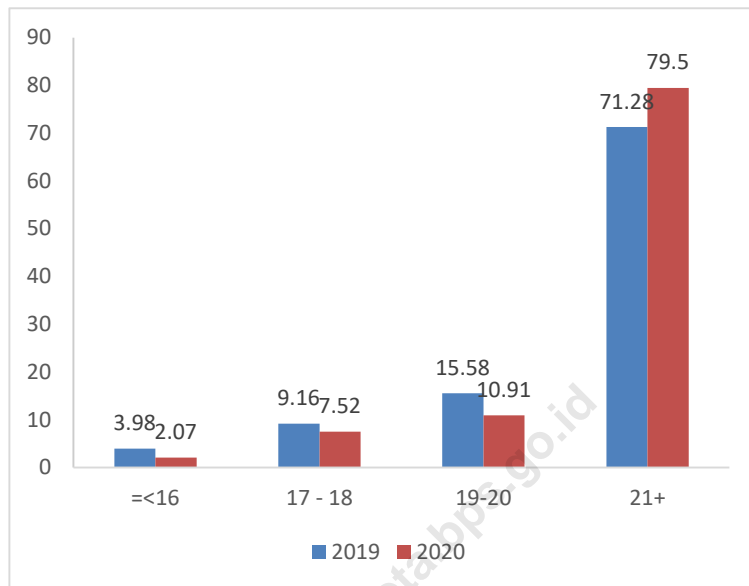
Perkawinan

Salah satu yang dapat memicu pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, persentase wanita Kota Pariaman berusia > 10 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia < 16 tahun sebesar 2,07 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,98 persen. Sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas dan persentasenya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 71,28 persen pada tahun 2019 naik menjadi 79,50 persen pada tahun 2020. Sementara itu, wanita yang melakukan perkawinan pertama pada tahun 2020 di usia 17-18 tahun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu dari 9,16 persen menjadi 7,52 persen. Untuk rentang usia 19-20 tahun juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 mencapai 15,58 persen menjadi 10,91 persen di tahun 2020.

Gambar 1.2 Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama (persen) Kota Pariaman, 2019-2020



Sumber: Kota Pariaman dalam Angka, 2019-2020

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018-2020, persentase wanita baru-mur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sebesar 37,33 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi 35,34 persen pada tahun 2020. Dapat disimpulkan dalam beberapa tahun terakhir persen tase wanita yang memakai alat/cara KB meningkat namun sebagiannya sudah berhenti menggunakannya di tahun 2020

Tabel 1.5 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB 2018-2020

Pernah/Tidak Memakai Alat KB	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Pernah	32.21	26.71	32.11
Sedang	29.19	37.33	35.34
Tidak pernah menggunakan	38.61	35.97	32.54

Sumber: Susenas 2018-2020

<https://pariamankota.bps.go.id>

2

Kesehatan & Gizi

Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kota Pariaman, 2020

Tenaga Kesehatan



Bukan Tenaga Kesehatan



Angka Harapan Hidup Tahun 2020

70,28

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat (persen), 2020



9,68 % Rumah Sakit Umum

14,6 % klinik

0,65 % Praktek pengobatan Tradisional

31,05 % Praktek Dokter

6,30 % UKBM

34,26 % Puskesmas

- Dukun Bersalin Lainnya

KESEHATAN DAN GIZI

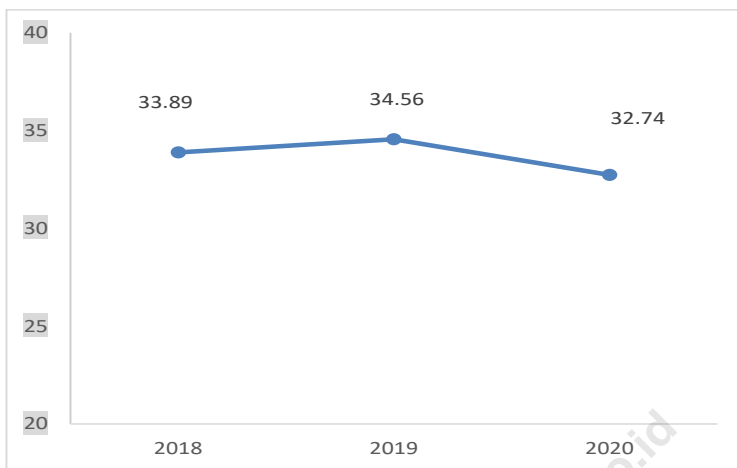
2

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian yaitu tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari seperti bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Gambar 2.1 Angka Kesakitan di Kota Pariaman, 2018-2020



Sumber: Susenas, 2018-2020

Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan penduduk Kota Pariaman yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 32,74 persen, atau mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 34,56 persen. Menurunnya angka morbiditas pada tahun 2020 dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang meningkat, dan terjadi penurunan rata-rata lama sakit penduduk. Sementara itu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan berobat jalan ada 56,45 persen, dan yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan ada sebanyak 14,94 persen.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman, 2020

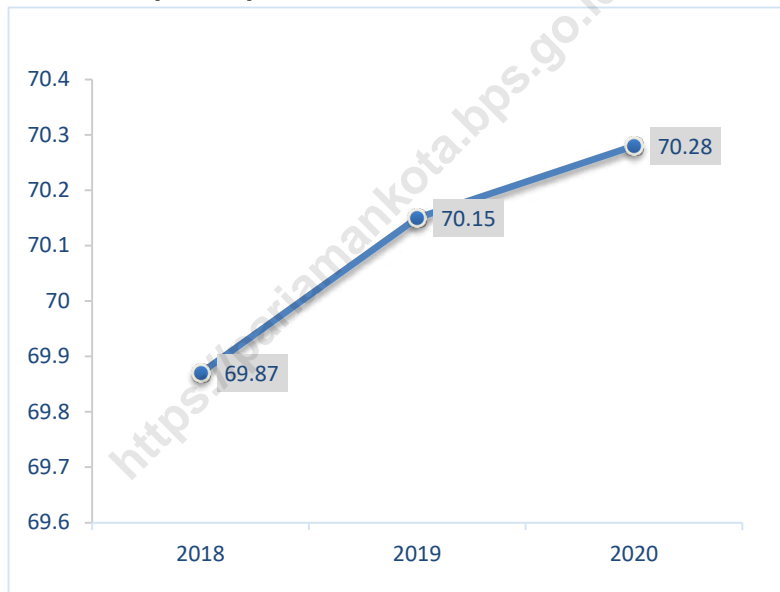
Indikator	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Lak-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan	29,69	37,12	33,42
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan	55,65	57,09	56,45
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan	13,01	16,85	14,94

Sumber: Susenas 2020

Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup penduduk Kota Pariaman terus mengalami peningkatan dari 69,87 persen di tahun 2018 menjadi 70,28 persen di tahun 2020. Ini berarti bahwa secara rata-rata bayi yang dilahirkan pada tahun 2020 dapat hidup selama 70 tahun. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk mengindikasikan semakin baiknya taraf kesehatan penduduk.

Gambar 2.2 Umur Harapan Hidup di Kota Pariaman, 2018-2020



Sumber: Susenas, 2018-2020

Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga

kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Tabel 2.2 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Di Kota Pariaman, 2019-2020

Indikator	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Persentase balita menurut penolong persalinan		
Tenaga Kesehatan		
Dokter	61,44	45,43
Bidan	38,21	54,57
Lainnya	0,00	2,30
Bukan Tenaga Kesehatan		
Dukun Beranak	0,35	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber: Susenas 2019-2020

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2020 mencapai 100 persen artinya tidak ada lagi penolong persalinan oleh tenaga dukun bayi di Kota Sawahlunto.

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan berkurangnya penduduk yang melakukan persalinan ke dukun beranak pada tahun 2019 sebesar 0,57 persen menjadi 0,00 persen di tahun 2020. Namun, penduduk yang melakukan persalinan ke dokter menurun dari 61,44 persen menjadi 45,43 persen di tahun 2020.

Penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/ tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat (Persen) Kota Pariaman, 2019-2020

Indikator	2019	2020
(1)	(3)	(4)
Rumah Sakit	7,28	9.68
Praktek Dokter/Bidan	51,21	35.05
Klinik/Praktek Dokter Bersama	11,80	14.06
Puskesmas/Pustu	28,07	34.26
UKBM*	4,08	6.30
Praktek Pengobatan Tradisional	1,51	0.65
Dukun Bersalin/Lainnya	0,25	

Sumber: Susenas, 2019-2020

*UKBM terdiri dari Polindes, Poskesdes, Posyandu dan Balai Pengobatan

Dari tabel 2.3 terlihat adanya peningkatan persentase penduduk yang berobat jalan ke Rumah Sakit , Klinik/Praktek Dokter Bersama, Puskesmas/Pustu dan UKBM yaitu dari 7,28 persen, 11, 8 persen dan 28,07 persen, persen dan 4,08 persen di tahun 2019 menjadi 9,68 persen, 14,06 persen, 34,36 persen, dan 6,30 persen pada tahun 2020. Sedangkan penduduk yang memanfaatkan berobat ke Praktek Dokter/ Bidan dan Praktek Pengobatan Tradisional turun dari 51,21 persen dan 1,51 Persen di tahun 2019 menjadi 35,05 persen dan 0,65 persen di tahun 2020.

Pemilikan jaminan kesehatan sangat diperlukan agar penduduk tidak mengalami kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan, terutama kendala yang berkaitan dengan kendala biaya. Pemerintah Kota Pariaman mempunyai komitmen yang kuat dalam mendukung Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Program ini bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Kota Pariaman. Pelaksanaan program JPKM telah dimulai sejak tahun 2003 sampai tahun 2012. Namun tidak semua masyarakat Kota Pariaman yang memanfaatkan jaminan kesehatan yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat di Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan (Persen) Kota Pariaman, 2020

Indikator	2020
(1)	(2)
BPJS Kesehatan PBI	42,55
BPJS Kesehatan Non PBI	32,99
Jamkesda	0,00
Asuransi Swasta	0,12
Perusahaan/ Kantor	0,30
Tidak Memiliki	24,04

Sumber: Susenas, 2020

Dari tabel 2.4 terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk menggunakan jaminan kesehatan pada tahun 2020 umumnya cukup tinggi. Jaminan kesehatan paling banyak yang digunakan masyarakat adalah BPJS PBI sebesar 43,35 persen, selanjutnya BPJS Non PBI sebesar 37,61 persen, perusahaan kantor 3,25 persen, asuransi swasta 2,77 persen dan Jamkesda sebesar 0,48 persen. Namun, sebanyak 13,47 persen penduduk belum memiliki jaminan kesehatan apapun.

3

Pendidikan



Angka Melek Huruf Kota Pariaman, 2020



99,05 99,12

Rata - rata Lama Sekolah di Pariaman, 2020

10,59

Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kota pariaman adalah 10,59 tahun yang setara dengan kelas satu SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pariaman, 2020

- Angka Partisipasi Murni
- Angka Partisipasi Kasar



SD/MI/Sederajat

99,60



SMP/MTs/Sederajat

102,57



SMA/SMK/MA/Sederajat

91,77

92,54

69,95

104,60

PENDIDIKAN

3

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup :

1. Pemerataan dan perluasan akses,
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,
3. Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik,
4. Peningkatan pembiayaan.

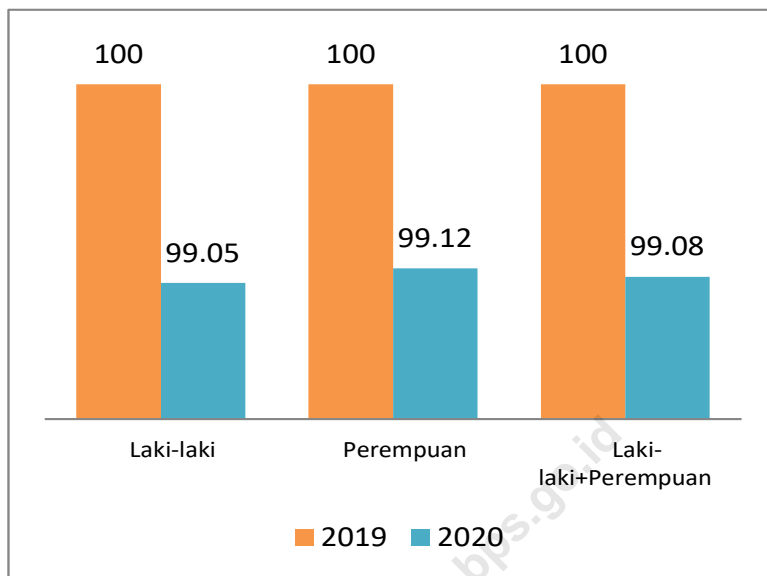
Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

Angka Melek Huruf

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan suatu ukuran yang paling mendasar dari tingkat pendidikan, karena membaca dan menulis merupakan pintu gerbang masuknya berbagai ilmu dalam kehidupan seseorang. Sehingga tanpa penguasaan terhadap kemampuan dasar tersebut, bisa dikatakan akan sangat sulit untuk bisa menguasai ilmu yang lebih tinggi lagi. Uraian diatas mempertegas bahwa indikator ini dapat menjadi suatu ukuran yang menunjukkan tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Gambar 3.1 Angka Melek huruf Menurut Jenis Kelamin (persen) di Kota Pariaman 2019-2020



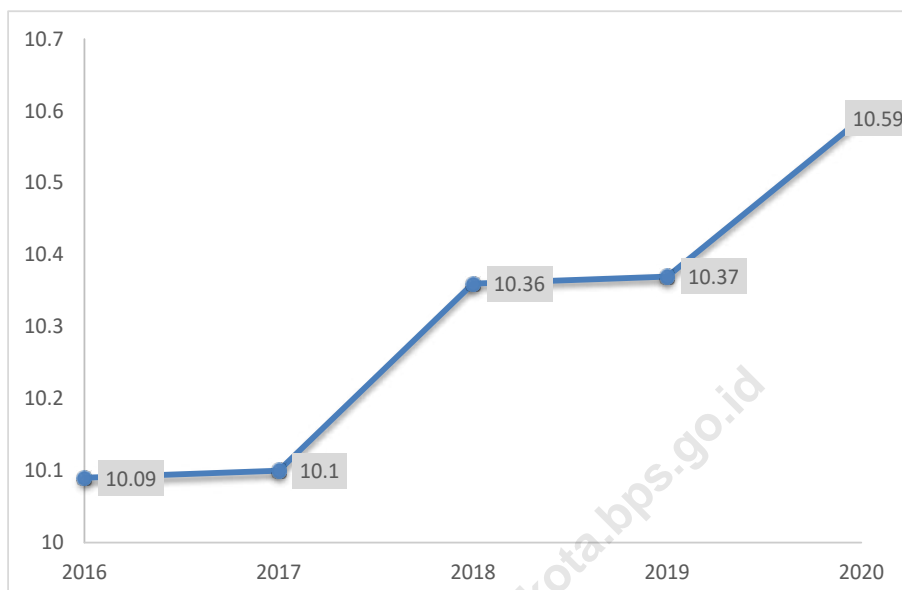
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2019-2020

Angka melek huruf dirasakan sudah penuh untuk menggambarkan perkembangan tingkat pendidikan penduduk. Jika ada penduduk yang buta huruf pada umumnya berasal dari kelompok umur tua, sehingga sulit untuk mengupayakan agar penduduk tersebut dapat membaca atau menulis. Oleh karena itu diperlukan indikator lainnya yang menggambarkan perkembangan tingkat pendidikan penduduk seperti rata-rata lama sekolah atau angka partisipasi sekolah.

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Peningkatan rata-rata lama sekolah mengindikasikan perbaikan tingkat pendidikan penduduk.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pariaman secara umum cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Pariaman adalah 10,59 tahun yang setara dengan kelas satu SMA.

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman, 2016-2020



Sumber: Indikator IPM, 2016-2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menjamin bahwa pada tahun 2030 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatkan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Penduduk usia 7-12 tahun yang sudah mengenyam bangku pendidikan dari tahun 2018 sampai 2020 terus meningkat, dimana tahun 2018 sudah sebesar 99,72 persen dan naik menjadi 99,99 persen di tahun 2020. APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 98,32 persen pada tahun 2020, sehingga sebanyak 1,68 persen penduduk usia 13-15 tahun belum mengenyam pendidikan. Pada usia 16-18 tahun APS naik dari 87,48 persen di tahun 2018 menjadi 88,58 persen, artinya adanya 11,42 persen dari penduduk usia 16-18 yang belum pernah sekolah.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni, 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
7 – 12 tahun	99.72	99.79	99.99
13 – 15 tahun	97.42	98.00	98.32
16 – 18 tahun	87.48	87.46	88.58
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD	99.72	99.55	99.61
SLTP	69.36	70.64	73.18
SLTA	63.48	78.31	77.40

Sumber: Pariaman Dalam Angka, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan, APM semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya partisipasi penduduk dalam melanjutkan jenjang pendidikannya.

Secara umum APM pada jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan dari 99,55 persen di tahun 2019 menjadi 99,61 persen, yang artinya ada 0,39 persen penduduk yang berusia 7-12 tahun belum mengenyam bangku Sekolah Dasar. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka APS akan semakin menurun. Sama halnya dengan APM, j. APM tingkat SMP sebesar 73,18 persen, menunjukkan penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMP sebesar 73,18 persen, dan APM tingkat SMA sebesar 77,40 persen.

Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat kesejahteraan penduduk diharapkan semakin baik. Penduduk dengan tingkat pendidikan setara SMP berpeluang memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan penduduk yang berpendidikan SD atau dibawahnya. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan setara SMP mencapai 16,89 persen. Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa persentase penduduk laki-laki yang minimal menamatkan tingkat pendidikan setara SMP lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 3.2 Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas di Kota Pariaman, 2020

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Wanita	Laki-laki + Wanita
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah	0.52	0.65	0.59
Tamat SD Sederajat	17.28	17.88	17.58
Tamat SMP Sederajat	18.00	15.83	16.89
Tamat SMA Sederajat	19.28	18.20	18.73
SMK	32.20	25.25	28.66
Dipoma I dan II	1.24	3.83	2.56
Diploma III	10.74	17.27	14.06
Diploma IV/S1/S2/S3	0.75	1.09	0.92
Jumlah	100	100	100

Sumber: Susenas, 2020

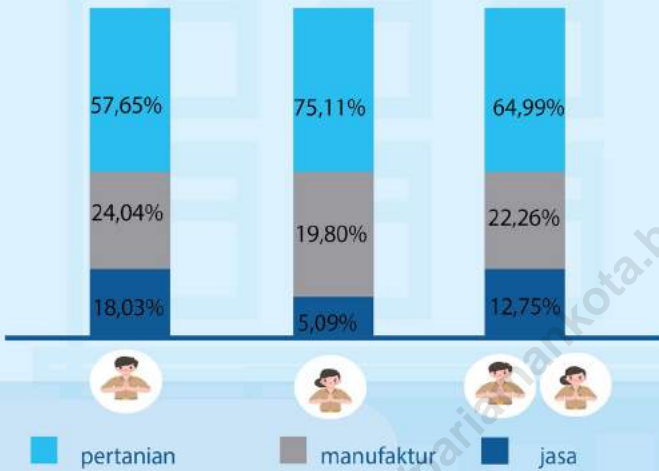
Dilihat menurut pendidikan tertinggi yang pernah di tamatkan, sebagian besar penduduk Kota Pariaman memiliki pendidikan setara SMK dengan persentase mencapai 28,66 persen. Persentase penduduk yang menamatkan perguruan tinggi masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar 17,54 persen. Penduduk yang tidak memiliki ijazah relatif rendah yaitu sebesar 0,59 persen.

Jika dibanding menurut jenis kelamin terlihat persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah tertinggi SMP hingga SMK lebih tinggi dari pada perempuan, namun memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Diploma ke atas) persentase perempuan yang memilikinya lebih besar dibandingkan laki-laki.

4

Ketenagakerjaan

Agustus 2020



Persentase Penduduk 15 tahun keatas menurut pekerjaan utama



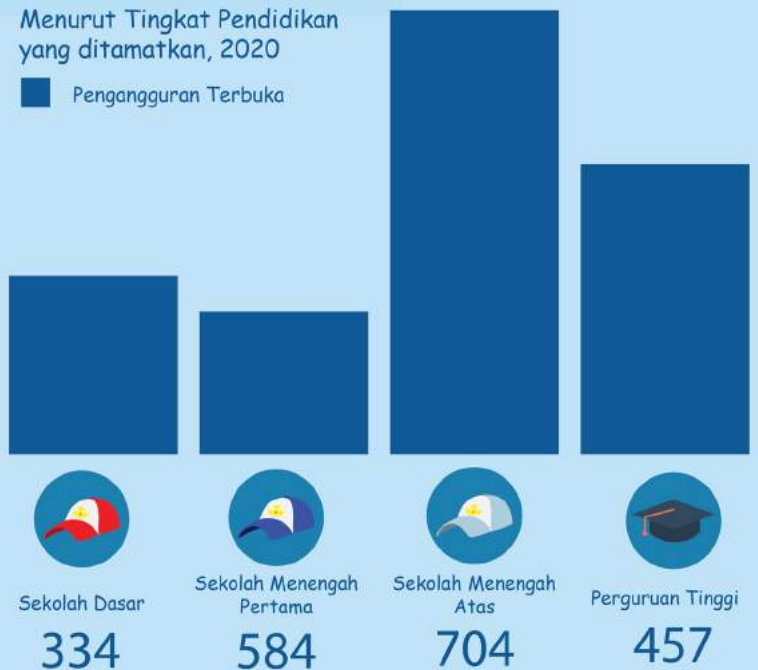
Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan



Penduduk 15 tahun keatas yang termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan, 2020

■ Pengangguran Terbuka



KETENAGAKERJAAN

4

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangkapembangunannasionaldanpemecahanmasalahketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih dan persentase pekerja anak.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Nilai TPAK yang terus meningkat menandakan bahwa ketersediaan

penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin banyak.

TPAK berfluktuatif dari 66,65 persen pada 2018 naik menjadi 68,95 persen pada 2019, kemudian turun kembali menjadi 64,16 persen di kondisi Agustus 2020. Penurunan TPAK ini merupakan indikasi menurunnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan penduduk perempuan keluar dari angkatan kerja disebabkan mengurus rumah tangga.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pariaman (Persen), 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			
Laki-laki	76.28	79.05	76.97
Perempuan	57.61	59.47	52.09
Laki-laki+Perempuan	66.65	68.95	64.16
Tingkat Pengangguran Terbuka			
Laki-laki	3.46	4.36	6.02
Perempuan	8.53	6.73	5.32
Laki-laki+Perempuan	5.72	5.42	5.73

Sumber: Sakernas, 2018-2020

Tingkat pengangguran terbuka tahun dari tahun 2018 sampai 2020 fluktuatif dari 5,72 persen pada tahun 2018 turun menjadi 5,42 persen di tahun 2019 kemudian naik lagi menjadi 5,73 di tahun 2020. Kenaikan angka TPT ini terkait dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan lapangan kerja semakin sedikit, sehingga lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja. Selain itu, juga terkait dengan tidak cukupnya jumlah lapangan kerja atau tidak adanya keahlian dari pencari kerja untuk memenuhi lapangan kerja tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pendidikan

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Secara umum pada Tabel 4.2 tampak bahwa persentase penduduk yang menganggur paling besar pada jenjang pendidikan SMA dan SMP diikuti oleh jenjang pendidikan minimal SD, SMK dan Perguruan tinggi masing-masing 334, 332 dan 408 orang. Pemerintah masih harus membuat terobosan untuk menekan bertambahnya jumlah pengangguran terdidik terutama dalam bidang kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan penduduk terdidik Kota Pariaman yang dirasa masih cukup lemah.

Tabel 4.2 Penduduk 15 tahun ke Atas yang Termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pariaman, 2020

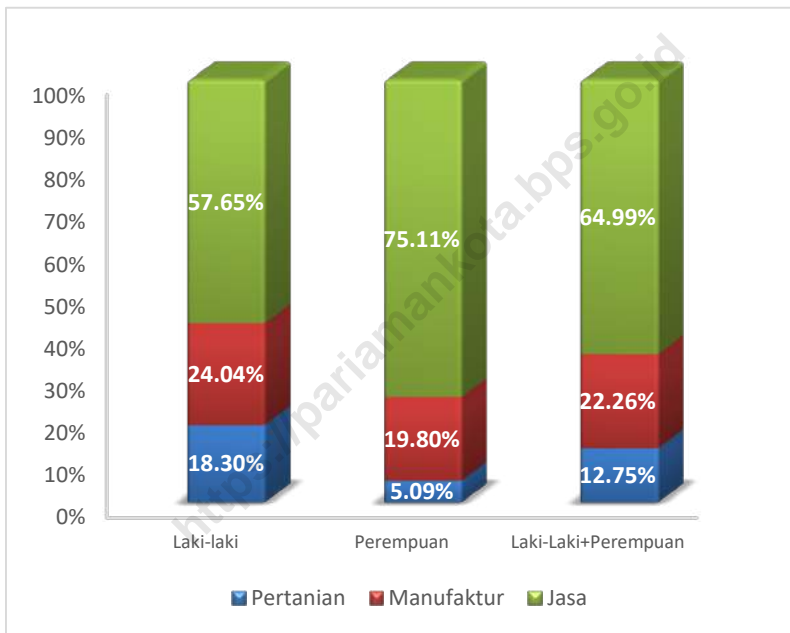
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Minimal SD/MI	334	-	334
SMP/Tsanawiyah	-	182	584
SMA/Aliyah	412	292	704
SMK	123	209	332
Diploma I/II/III	-	49	49
Universitas/S1/S2/S3	204	204	408
Total	1073	5.32	2411

Sumber: Pariaman Dalam Angka, 2021

Lapangan Usaha

Berbeda dengan tahun sebelumnya distribusi penduduk ditampilkan menurut lapangan pekerjaan utama, yang dibagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok lapangan pekerjaan utama pertanian, lapangan pekerjaan utama manufaktur dan lapangan pekerjaan utama jasa.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Pariaman, 2020



Sumber: Pariaman Dalam Angka, 2021

Secara umum penduduk Kota Pariaman yang bekerja mayoritas berada pada kelompok lapangan pekerjaan utama jasa sebesar 64,99 persen, diikuti sektor manufaktur (22,26 persen) dan pertanian (12,75 persen). Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang bekerja di lapangan pekerjaan utama jasa, lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan pada lapangan pekerjaan utama manufaktur dan pertanian persentase laki-laki lebih tinggi disebabkan jenis pekerjaan pada lapangan pekerjaan ini membutuhkan kekuatan fisik. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan

peralatan, mesin dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual.

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Status Pekerjaan sebagai, buruh/karyawan/pegawai lebih dominan yaitu sebesar 45,42 persen diikuti status pekerjaan berusaha sendiri sebesar 16,49 persen. Sedangkan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar lebih kecil dari yang lainnya yaitu 5,22 persen.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Kota Pariaman, 2020

No	Status Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Berusaha sendiri	17.49	15.12	16.49
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	10.66	15.72	12.79
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	6.40	3.59	5.22
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	48.49	41.18	45.42
5	Pekerja bebas	8.69	5.21	7.23
7	Pekerja keluarga/tak dibayar	8.27	19.18	12.85
Total		100	100	100

Sumber: Sakernas,2020

5

Tarif & Pola Konsumsi

2020

Indeks Gini Ratio

0,310

Pada tahun 2020 naik menjadi 0,310 bila dibandingkan tahun 2019 yaitu 0,300 yang menunjukkan ketimpangan antar kelompok semakin besar dari tahun sebelumnya.

Distribusi Pengeluaran penduduk Kota Pariaman, 2020

21,60 % 40% terendah

37,93 % 40% menengah

40,47 % 20% tertinggi

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan komoditas makanan dan non makanan (persen)



rata-rata pengeluaran per kapita per bulan komoditas bukan makanan (Rupiah)

aneka barang dan jasa
Rp. 188.771

Perumahan
Rp. 279.403

keperluan pesta
Rp. 34.753

Pakaian, alas kaki
Rp. 79.451

Pajak dan asuransi
Rp. 45.893

Barang tahan lama
Rp. 104.984



TARAF DAN POLA KONSUMSI

5

Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, begitu pula sebaliknya permintaan akan barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi.

Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Makanan jadi banyak digemari karena kepraktisannya. Namun di sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran akan tingginya resiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi.

Jumlah dan persentase penduduk miskin adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan pendapatan penduduk yang meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin memberi indikasi menurunnya pendapatan penduduk.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 5.1 Perkembangan Pengeluaran Rata-rata Perkapita/Bulan di Kota Pariaman, 2019-2020

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		(%)	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	660,802	764 498	50.41	51.04
Bukan Makanan	650,023	733 255	49.59	48.96
Perumahan	245,223	279,403	18.71	18.65
Barang dan Jasa	161,296	188,771	12.30	12.60
Pakaian	64,107	79,451	4.89	5.30
Barang Tahan Lama	110,677	104,984	8.44	7.01
Lainnya	68,722	80,646	5.24	5.38
Jumlah	1.196.357	1.355.343	100.00	100.00

Sumber: Susenas, 2019-2020

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2019-2020 penduduk meningkat dari Rp1.196.357,- menjadi Rp.1.355.343,- . Persentase pengeluaran untuk makanan memperlihatkan adanya kenaikan yaitu dari 50,41 persen menjadi 51,04 persen pada tahun 2020. Dan sebaliknya persentase untuk pengeluaran bukan makanan menurun dari 49,59 persen pada tahun 2019 menjadi 48,96 persen di tahun 2020. Ini mengindikasikan pengeluaran makanan menjadi prioritas. Pengeluaran pada kelompok bukan makanan mengalami peningkatan pada semua jenis pengeluaran kecuali pengeluaran perumahan dan barang lainnya yang justru mengalami penurunan dari tahun 2019.

Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh kelompok 40 persen penduduk yang berpengeluaran paling rendah, 40 persen penduduk berpengeluaran sedang, dan 20 persen penduduk berpengeluaran tinggi. Disamping kriteria yang ditetapkan Bank Dunia ada indikator lain yang juga sering digunakan yaitu Indeks Rasio.

Tabel 5.2 Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kapita di Kota Pariaman (Persen), 2018-2020

Golongan Pengeluaran	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
40% Terendah	21,16	21,54	21,60
40% Menengah	38,33	39,70	37,93
20% Tertinggi	40,51	38,76	40,47

Sumber: Susenas, 2018-2020

Secara umum mengukur ketimpangan yang pertama dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk miskin. Selanjutnya dapat diukur dengan melakukan perbandingan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang kaya. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk miskin menerima diatas 17 persen pendapatan nasional.

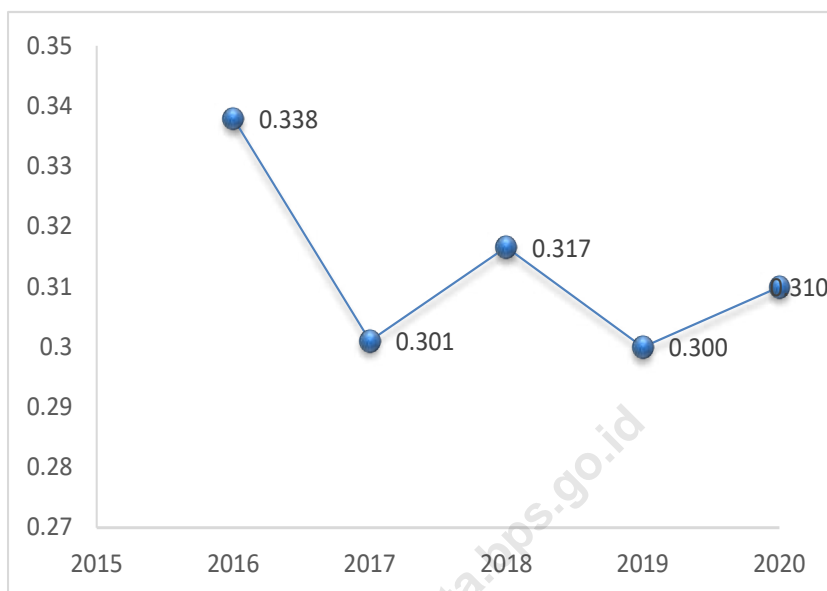
Menurut Hudiyanto (2014), derajat ketimpangan pendapatan berdasarkan distribusi ukuran yaitu:

- **Tingkat ketimpangan berat**, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- **Tingkat ketimpangan sedang**, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- **Tingkat ketimpangan ringan**, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional.

Tabel 5.2 Menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kota pariaman termasuk kedalam tingkat ketimpangan ringan dimana 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional yaitu 21,60 persen.

Sementara itu untuk koefisien indeks gini, tidak menunjukkan perubahan, meskipun pendapatan penduduk cenderung naik turun, namun indeks gini tetap berapa pada kisaran 0,30 hingga 0,34 dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 naik menjadi 0,310 bila dibandingkan tahun 2019 yaitu 0,300 yang menunjukkan ketimpangan antar kelompok semakin besar dari tahun sebelumnya.

Gambar 5.1 Indeks Gini Ratio Kota Pariaman, 2016-2020



Sumber: Susenas, 2020

Golongan Pengeluaran

Golongan pengeluaran penduduk dibagi atas 6 (enam) golongan yaitu penduduk yang golongan pengeluaran terendah yaitu kurang dari 299.999,-, penduduk yang golongan pengeluaran 300.000 - 499.999,- penduduk yang golongan pengeluaran 500.000 – 749.999, penduduk yang golongan pengeluaran 750.000- 999.999,- penduduk yang golongan pengeluaran 1.000.000 – 1.499.999,- dan penduduk yang golongan pengeluaran tertinggi yaitu 1.500.000 lebih.

Tabel 5 menyajikan data mengenai persentase penduduk menurut golongan pengeluaran. Tidak ada penduduk pada golongan pengeluaran terendah (kurang dari Rp 299.999) dan golongan terendah kedua sebanyak 0,77 persen. Persentase penduduk dengan golongan pengeluaran lebih dari Rp 1.500.000 tercatat paling banyak yakni 33,49 persen dan diikuti oleh golongan pengeluaran Rp1.000.000-Rp1.499.999 sebanyak 30,74 persen.

Tabel 5.3 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Pariaman, 2020

Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan		2020
(Rp)		
(1)		(2)
<=299.999		0,00
300.00-499.999		0,77
500.000-749.999		11,43
750.000-999.999		23,57
1.000.000-1.499.999		30,74
>1.500.000		33,49
Persentase		100,00

Sumber: Pariaman Dalam Angka, 2021

6

Perumahan & Lingkungan



Dalam *Multidimensional Poverty Index*, standar hidup yang layak dilihat dari indikator standar hidup: bahan bakar memasak, sanitasi, air bersih, sumber penerangan, kondisi lantai rumah, dan kepemilikan aset



68,11%

rumah tangga di Sumatera Barat sudah memiliki fasilitas buang air besar sendiri

Kota Pariaman sudah menggunakan fasilitas buang air besar yang baik, dan sekitar **18,19%** rumah tangga menggunakan fasilitas bersama, Mck Umum dan tidak menggunakan fasilitas buang air besar

81,81%

Sanitasi Layak



Jenis Lantai

99,54%

rumah tangga di Sumatera Barat sudah memiliki lantai rumah berjenis bukan tanah

rumah tangga di Kota Pariaman sudah memiliki lantai rumah berjenis bukan tanah

100%



Bahan Bakar Memasak

75,21%

rumah tangga di Sumatera Barat sudah menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar utama untuk memasak

rumah tangga di Kota Pariaman sudah menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar utama untuk memasak sedangkan sekitar **10%** rumah tangga menggunakan bahan bakar kayu untuk memasak

82,52%



97,39%

rumah tangga di Sumatera Barat sudah menggunakan Listrik PLN sebagai sumber penerangan utama

rumah tangga di Kota Pariaman sudah menggunakan Listrik PLN sebagai sumber penerangan utama

99,57%

Sumber Penerangan



Air Bersih

77,62%

rumah tangga di Sumatera Barat yang bersumber air minumannya berasal dari pompa, leding, sumur terlindung, dan mata air terlindung

Akan tetapi di Kota Pariaman kebanyakan rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur pompa, mata air terlindung, dan leding

82,80%

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu, rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal memengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuannya diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Kualitas Rumah Tinggal

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, lantai dan dinding terluas yang digunakan, termasuk fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Perumahan di Kota Pariaman, 2019-2020

Indikator Perumahan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah	99.64	100.00
Atap layak *)	100.00	100.00
Dinding permanen **)	99.76	100.00
Luas lantai ≥ 10 m ² perkapita	1.66	0.48

Sumber: Susenas 2019-2020

*Atap layak: Atap seng, beton, genteng, sirap dan asbes

** Dinding permanen: Dinding tembok dan kayu

Dari data Susenas 2019 dan 2020, persentase rumah tangga yang berlantaikan bukan tanah hampir mencapai 100 persen yaitu 99,64 persen di tahun 2020, artinya jarang ditemukan rumah berlantaikan tanah di Kota Pariaman. Kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tangga yang menggunakan atap terluas. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk,

mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001).

Berdasarkan data Susenas 2019-2020 persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita di atas 10 m² pada tahun 2019 mencapai 98,34 persen dan naik di tahun 2020 menjadi 99,52 persen.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2020 telah mencapai 95,61 persen. Gaya hidup penduduk dalam mengkonsumsi air minum juga telah banyak berubah. Dari tabel terlihat rumah tangga di Kota Pariaman yang mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan ledeng mencapai 55,64 persen di tahun 2019 dan naik menjadi 60,16 persen di tahun 2020.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai

dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2020, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik mencapai 81,81 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019 (80,68 persen).

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kota Pariaman, 2019-2020

Fasilitas Perumahan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	55.64	60.16
Air minum bersih	76.23	95.61
Jamban sendiri	89.38	89.29
Jamban sendiri dengan tangki septik	80.68	81.81
Sumber penerangan listrik	99.72	97.39

Sumber: Susenas, 2019-2020

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Di Kota Pariaman rumah tangga yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik dalam dua tahun terakhir sudah hampir mencapai 100 persen yaitu 99,72 persen di tahun 2019 dan 97,39 persen di tahun 2020.

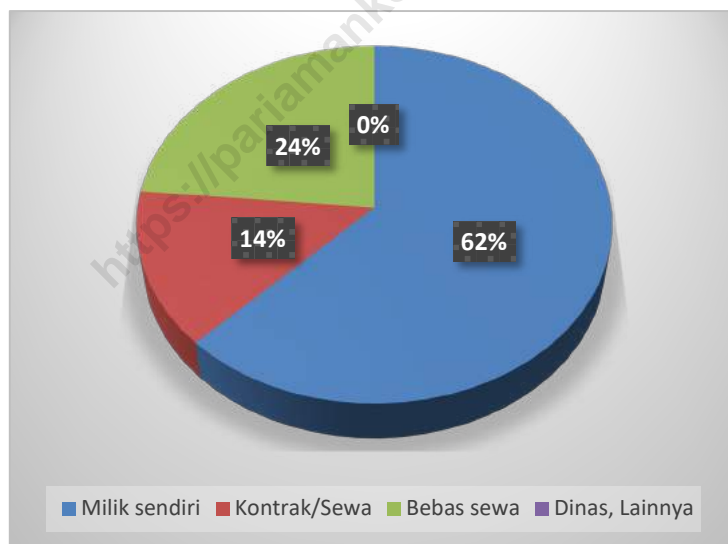
Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status rumah

kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2020, rumah tangga di Kota Pariaman yang menempati rumah milik sendiri hanya sebesar 62,41 persen, kemudian sebanyak 14,06 persen adalah rumah kontrak/sewa. Rumah tangga yang menempati rumah bebas sewa di Kota Pariaman yaitu 23,53 persen. Cukup tingginya rumah kontrak/sewa dan rumah bebas sewa dimungkinkan karena harga jual tanah di Kota Pariaman cukup tinggi, sehingga penduduk banyak yang mengontrak, sewa atau menempati rumah milik orang tua/saudara.

Gambar 6.1 Status Kepemilikan Rumah (Persen) di Kota Pariaman, 2020



Sumber: Susenas, 2020

<https://pariamankota.bps.go.id>



Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin Kota Pariaman, 2020

4,10

ribu jiwa

Tingkat
Kemiskinan
3,66 %



Indikator Penduduk Miskin di Kota Pariaman Tahun 2020

Garis Kemiskinan
(Rupiah)

480.028

Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1)

0,49

Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2)

0,10

KEMISKINAN



Masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok bangsa Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan yang cenderung menurun secara melambat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Hal ini tergambar dari belum meratanya pembangunan antar daerah di Indonesia. Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah, karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak di Indonesia, tidak cukup hanya dari pemerintah, tetapi juga dari lembaga penelitian, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (*Worldbank*).

Perkembangan Penduduk Miskin

Secara umum, persentase penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk Kota Pariaman menunjukkan tren di seputar angka 4 persen. Tingkat kenaikan kemiskinan yang sebesar 3,36 persen pada tahun 2020 adalah yang terendah sepanjang periode lima tahun terakhir. Berdasarkan tabel 7.1, adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di tahun 2016 yaitu 5,22 ribu menjadi 4,10 ribu di tahun 2020.

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Pariaman, 2016-2020

Tahun	Jumlah penduduk miskin (Ribu)	Persentase penduduk miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2016	5,22	4,47
2017	5,20	4,49
2018	5,03	4,40
2019	4,76	4,20
2020	4,10	3,66

Sumber: BPS Kota Pariaman

Suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang dibu tuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK. Oleh karena itu, nilai GK berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu waktu. Selama periode 2018-2020, Garis Kemiskinan Kota Pariaman mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2018 sebesar Rp431.368,- menjadi Rp446.514,- di tahun 2019, kemudian Rp480.028,- di tahun 2020.

Tabel 7.2 Beberapa Indikator Penduduk Miskin di Kota Pariaman, 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Garis Kemiskinan (Rupiah)	431.368	446.514	480.028
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,68	0,49	0,49
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,24	0,07	0,10

Sumber: BPS Kota Pariaman

Selain GK, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan perlu diperhatikan. Ukuran untuk mengukur kesenjangan pengeluaran disebut sebagai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Berdasarkan tabel 7.2, nilai P1 cenderung menurun, pada tahun 2018 dari 0,68 turun menjadi 0,49 di tahun 2019 dan tahun 2020. Penurunan nilai P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Semakin kecil nilai P1 berdampak pada semakin mudah penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Ukuran lainnya untuk melihat kondisi kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama 2018-2020, nilai P2 juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020, nilai P2 sebesar 0,10 turun dari tahun 2018 yaitu 0,24. Semakin kecil nilai P2 mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah.

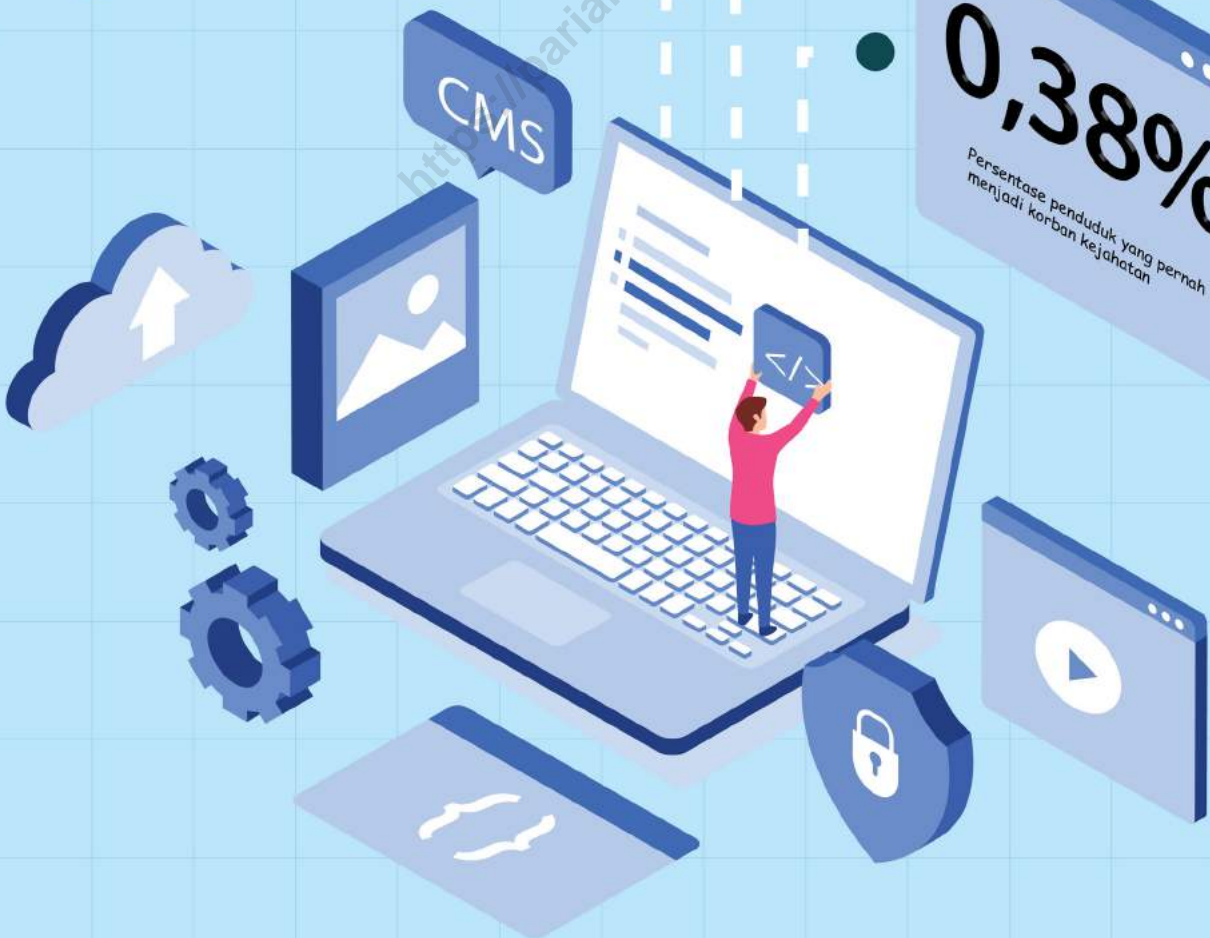
8

Sosial Lainnya

93,71%
Penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan telepon seluler selama tiga bulan terakhir

62,29%
Penduduk usia 5 tahun keatas yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir

0,38%
Persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan



<http://pariamankota.bps.go.id>

SOSIAL LAINNYA

8

Globalisasi telah mendorong perubahan pola hidup masyarakat. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas. Tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak.

Tabel 8.1 Persentase Indikator Sosial Lainnya di Kota Pariaman, 2018-2020

No	Indikator	Tahun		
		2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase rumah tangga penerima kredit usaha	33,7	25,54	29,2
2.	Persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan	1,37	1,01	0,38
3.	Persentase rumah tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Sejahtera (KKS)	13,96	13,91	23,7

Sumber: Susenas, 2018-2020

Penerima Kredit Usaha

Kredit usaha pada umumnya diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bantuan modal dan pembiayaan bagi usaha produktif. Kredit usaha umumnya diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), modal ventura, Program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pegadaian, dan sebagainya. Dalam SUSENAS, kredit usaha bisa berupa Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Bank selain KUR, KUBE/KUB, program koperasi, perorangan (dengan bunga), dan lainnya.

Tahun 2018, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha cukup besar yaitu sebesar 33,70 persen kemudian menurun sedikit menjadi 25,54 persen di tahun 2019 dan tahun 2020 naik kembali menjadi 29,2 persen. Kredit usaha sangat bermanfaat terutama bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam menopang perekonomian Kota Pariaman. Kenaikan persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha menggambarkan minat masyarakat semakin meningkat untuk memperoleh kredit usaha, terutama dari lembaga keuangan atau bank.

Tindak Kejahatan

Keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan rakyat. Rasa aman dari tindak kejahatan menjadi salah satu indikator pendukung yang mencerminkan rakyat sejahtera dan menjadi salah satu aspek penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia oleh BPS tahun 2014. Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan (BPS). Tindak kejahatan atau kriminalitas umumnya terjadi sebagai akibat dari kesenjangan sosial dan ekonomi suatu negara, serta bisa bersumber dari faktor politik.

Tahun 2018, persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan di Kota Pariaman sebesar 1,37 persen. Angka ini turun menjadi 1,01 persen di tahun 2019 dan 0,38 persen di tahun 2020. Jenis kejahatan yang dialami dapat berupa pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, perkosaan, dan lainnya. Penurunan jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dapat dipandang sebagai suatu hal yang terjadi seiring dengan penurunan tindak kejahatan.

Akses Pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Di era informasi saat ini, kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan akses Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong pergerakan sektor ekonomi. Tantangan pembangunan dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur membantu konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah lain secara cepat dan luas. Di samping pembangunan secara fisik, pembangunan jalur transportasi dan TIK juga penting sebagai salah satu infrastruktur konektivitas.

Kemajuan di bidang teknologi informasi memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Potensi TIK jika dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pembangunan nasional, TIK berperan serta menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Semakin banyak penduduk yang memiliki akses TIK dan terus mengikuti kemajuan teknologi, maka dapat dipastikan kesejahteraan penduduk akan semakin meningkat.

Persentase rumah tangga yang memiliki komputer/laptop berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2020, rumah tangga yang memiliki komputer/laptop mengalami penurunan yaitu 33,50 persen dari tahun 2019 yaitu 39,94 persen.

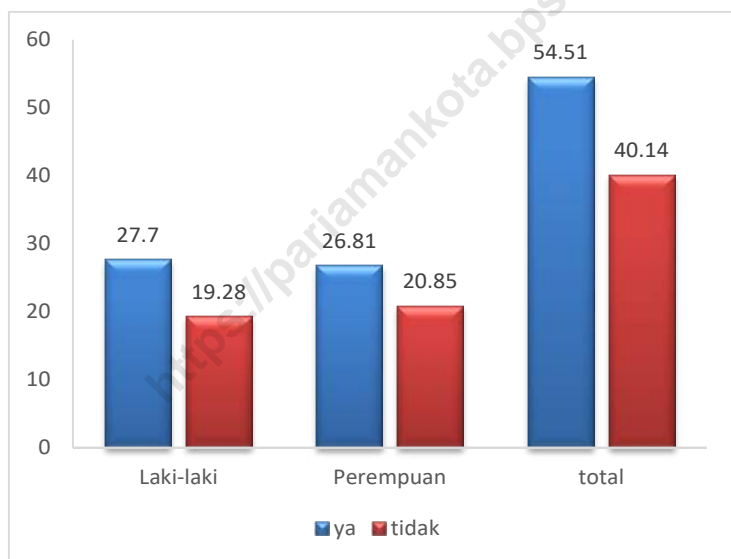
Persentase penduduk yang mengakses internet meningkat dari 49,83 persen di tahun 2019 menjadi 62,29 persen di tahun 2020. Persentase penduduk yang mempunyai akses telepon seluler tahun 2020 sebesar 93,13 persen atau meningkat 1,58 persen dibanding tahun 2019.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas yang Memiliki/Menguasai Teknologi Informasi di Kota Pariaman, 2020

Alat Komunikasi dan Informasi (1)	Tahun		
	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)
Telepon selular	65.99	92.13	93.71
Akses internet	45.58	49.83	62.29
Rumah tangga yang memiliki kom- puter/laptop	34,96	39,94	33,50

Sumber: Susenas, 2018-2020

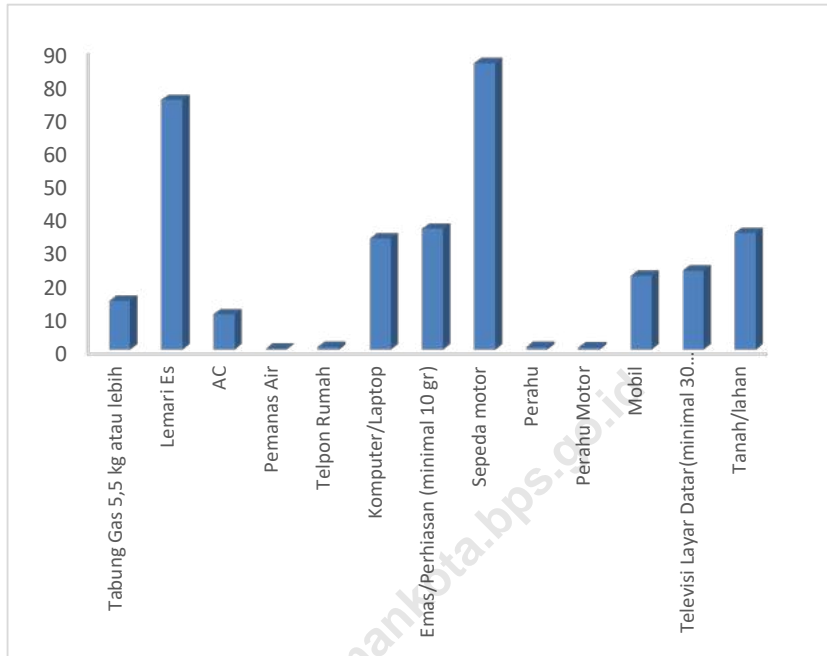
Gambar 8.1 Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas yang Memakai dan Akses Teknologi Informasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman, 2020



Sumber: Susenas, 2020

Seiring perkembangan arus informasi yang mengalir deras, masyarakat juga semakin membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitasnya sehari-hari, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hiburan. Oleh sebab itu, para vendor telepon selular berlomba-lomba menguasai pangsa pasar dengan melihat antusiasme masyarakat yang cukup besar untuk memiliki telepon selular yang sesuai dengan kebutuhannya.

Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Barang dan Jenis Barang yang dimiliki di Kota Pariaman, 2020



Sumber: Susenas, 2020

Gambar 8.2 dapat dilihat rumah tangga yang memiliki sepeda motor, lemari es dan emas perhiasan minimal 10 gram mendominasi dari barang yang dimiliki barang berdasarkan dari jenis barangnya, yaitu masing-masing sebesar 86,29 persen, 75, 14 persen dan 36,38 persen



Sensus
Penduduk
2020



DATA
MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PARIAMAN

Jl. Imam Bonjol No 22, Alai Gelombang, Pariaman
Telp./Fax 0751 - 93785; Email : bps1377@bps.go.id
Website : <https://pariamankota.bps.go.id>

ISBN 978-623-5699-02-8

